



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan III
Universitas Jember
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Jember selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	%	40	42.54
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30	%	20	9.20
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	15	56.67
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20	%	15	36.52
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5	Rasio	0.4	4.76
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6	Rasio	0.5	2.04
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	%	30	65.99
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	4	22.85



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 4] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85	Nilai	0	0
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Capaian IKU 1 pada TW-3 = 42,54 persen, dengan rincian Jumlah Lulusan 7814 Jumlah responden = 7036 (90,04%), jumlah alumni yang bekerja 2244 orang; jumlah alumni yang berwirausaha 516 dan jumlah alumni yang studi lanjut 805.

Kendala/Permasalahan

1. Tidak semua alumni mengisi link tracer study;
2. Beberapa unit kerja masih menggunakan teknik mobilisasi dalam pengisian link tracer study dan proses upgrade isian belum selesai dilakukan;
3. Rencana melibatkan dosen pembimbing skripsi untuk menghubungi alumni masih belum terlaksana dengan efektif.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memantau kinerja surveyor melalui evaluasi kinerja surveyor tracer study setiap triwulan secara luring dan melalui grup whatsapp setiap minggu;
2. Menghimbau beberapa unit kerja yang melakukan teknik mobilisasi pengisian tracer study menjelang yudisium/wisuda, untuk melakukan upgrade data tracer study sesuai dengan keadaan data yang sesungguhnya;
3. Evaluasi kinerja surveyor tracer study pada Triwulan 3;
4. Menghimbau pimpinan fakultas untuk mengikutsertakan peran dosen pembimbing skripsi dalam mengontak alumni yang menjadi bimbingannya.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Jumlah mahasiswa aktif UNEJ adalah seluruh mahasiswa jenjang D3, D4, S1 semester 5 keatas yang berstatus aktif pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 per tanggal 29 September 2025 pukul 08.00 WIB adalah 10.220 Mahasiswa.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar program studi hingga akhir September atau semester



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Gasal 2025/2026 adalah sejumlah 4.290 mahasiswa diluar rumpun kesehatan (FK, FKG, Farmasi dan Keperawatan yg telah dikonversi menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar program studi, dengan rincian sebagai berikut :

Variabel a

1. Magang MSIB = $21 + 18 = 39$ Mahasiswa
2. Magang Mandiri = $888 + 517 = 1.405$ Mahasiswa
3. Asistensi Mengajar (Mandiri) = $581 + 323 = 904$ Mahasiswa
4. Kampus Mengajar = 0 Mahasiswa
5. Studi Independen MSIB = $1 + 14 = 15$ Mahasiswa
6. Studi Independen Mandiri = 0 Mahasiswa
7. Pertukaran Mahasiswa (Mandiri) = 1 Mahasiswa
8. KKN Tematik = $50 + 87 = 137$ Mahasiswa
9. Riset Kementerian = 0 Mahasiswa
10. Riset (Mandiri) = $52 + 5 = 57$ Mahasiswa
11. Monitoring outbound internal = $323 + 1.404 = 1.727$ Mahasiswa

Total Mahasiswa = 4.290 Mahasiswa.

Variabel b

Mahasiswa Berprestasi Minat dan Bakat

Kompetisi tingkat Internasional = 206

Kompetisi tingkat Nasional = 421

Kompetisi tingkat Provinsi = 34

Sertifikasi Kompetensi Internasional = 2141

Karya Mahasiswa = 63

Jumlah = 2865

Kendala/Permasalahan

I. Program Kementerian :

1. BKP program kementerian tidak ditawarkan oleh kementerian (Asistensi mengajar, Kewirausahaan merdeka, dan PMM);
2. Konversi tidak maksimal karena waktu pelaksanaan pembelajaran diluar program studi belum selesai sesuai jadwal entri nilai reguler;
3. Tim MBKM fakultas kurang memahami alur/SOP pembelajaran diluar program studi;
4. Mahasiswa terus mengulang kegiatan MBKM (lebih dari 2x) sehingga tidak dapat dikonversi dan tidak diakui di PDDikti.

II. Program Mandiri :

1. Tidak ada laporan terkait pelaksanaan Program Mandiri sehingga tidak terpantau siapa saja yang telah mendaftar Program Mandiri tetapi belum mengisi outbound dan konversi;
2. Kurang Memahami SOP :
 - PKS telah kadaluarsa
 - Mahasiswa melakukan PRS reguler maksimal, sehingga tidak ada ruang untuk konversi kegiatan di luar Program Studi;
3. Tidak maksimalnya pemanfaatan peluang pertukaran pelajar PTN se- Jawa Timur oleh Program Studi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan jumlah peserta pada BKP program Mandiri Program Studi/Fakultas;
2. Meningkatkan Kegiatan program outbound internal atau di dalam kampus (Lintas Fakultas);
3. Melakukan sosialisasi kembali kepada tim MBKM Fakultas;



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

4. Memberikan penghargaan/reward kepada prodi/fakultas yang mencapai prosentase tertentu dari total mahasiswanya.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain sebanyak 706, bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 142, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sebanyak 706, bertambah TW3 dengan tahun sebelumnya, dan sebagian besar berasal dari program hibah riset dan pengabdian masyarakat baik pendanaan internal maupun eksternal.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala untuk kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain atau di industri atau lainnya di luar negeri diantaranya adalah aturan pembatasan berkegiatan diluar kampus karena kebijakan efisiensi.

Strategi/Tindak Lanjut

Memperbanyak program dan hibah yang memungkinkan dosen berkegiatan diluar kampus bahkan luar negeri.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri 791; atau persentase pengejar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri 101, Jumlah Dosen dengan NIDN/NIDK sebanyak 1410.

Kendala/Permasalahan

Telah dibuatkan aplikasi untuk mengelola praktisi mengajar namun kepegawaian tidak mendapatkan akses untuk mengambil SK tersebut.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya koordinasi antara akademik dan kepegawaian.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan

Jumlah luaran dosen dan tenaga kependidikan yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional pada TW 3 tahun 2025 ini yaitu sebagai berikut:

1. Luaran Scopus : 477;
2. Luaran WoS : 16;
3. Luaran Garuda : 1432;
4. Luaran Google Scholar : 3125;
5. Luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : 451;
6. Buku : 277;
7. Penelitian : 686.
8. Pengabdian : 24;
9. Jumlah Dosen ber-NIDN/NIDK : 1410

Kendala/Permasalahan

Tidak terlaksananya beberapa program yang mendukung penulisan karya ilmiah karena terkendala efisiensi.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan kegiatan secara online dan pendampingan khusus bagi yang membutuhkan.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran **[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1**

Progress/Kegiatan

Merupakan implementasi kerja sama yang dilakukan oleh program studi, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama maupun Implementation Arrangement. Dari 70 program studi yang ada, terdapat 143 kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada TW III (periode Juli - September 2025). Implementasi kerja sama masih masih didominasi pada kegiatan magang mahasiswa.

Kendala/Permasalahan

1. Implementasi kegiatan kerja sama masih didominasi pada pelaksanaan magang mahasiswa, masih perlu peningkatan atau perluasan bidang kerja sama Tridharma lainnya;
2. Masih belum optimalnya kerja sama luar negeri terutama dengan Perguruan Tinggi QS 200.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong program studi untuk memperluas mitra kerja sama, dan optimalisasi jenis kegiatan dalam implementasi kerja samanya.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran **[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi**



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot berdasarkan data yang ada di dashboard IKU UNEJ sebanyak 65.69% (3096 MK dari total 4713 MK). Jumlah mata kuliah menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yaitu 3110. Validasi RPS akan dilakukan pada akhir semester genap atau akhir triwulan 4

Kendala/Permasalahan

1. RPS yang valid dan sesuai dengan kriteria IKU 7 masih belum optimal;
2. Data IKU 7 baru berdasarkan persepsi dosen belum berdasarkan hasil validasi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Validasi RPS dilakukan pada awal perkuliahan sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki RPS;
2. Pelatihan metode pembelajaran case method dan team-based project dilakukan setiap semester;
3. Penyusunan pedoman pembelajaran berbasis case method dan team-based project.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

- Saat ini Prodi S1 yang telah mendapatkan akreditasi internasional sebanyak 16 prodi. Sesuai rumus IKU, perhitungan capaian IKU 8 menggunakan rumus $n/tx100$
 n =Jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.
 t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)
Jumlah prodi D-3=8 prodi
Jumlah prodi D-4= 3 prodi
Jumlah prodi S1= 59 prodi
Total prodi S1, D3 dan D4=70
IKU 8= $16/70=22,85\%$
- Pada tanggal 6-8 Agustus 2025, sebanyak 4 prodi soshum telah di-site visit oleh lembaga akreditasi internasional FIBAA dan penetapan hasil diperkirakan bulan Desember 2025.
- Pada Bulan Juli 2025, ada 2 Prodi Fakultas Teknik yaitu Prodi Teknik Sipil dan Teknik Elektro telah mensubmit dokumen akreditasi ke lembaga akreditasi IABEE, evaluasi pertama oleh IABEE telah dilakukan pada bulan September 2025, dan akan divisitasi pada bulan Desember 2025.

Kendala/Permasalahan

1. Pada tahun 2028 akreditasi internasional 3 prodi sudah habis;
2. Keraguan terhadap pengakuan lembaga akreditasi internasional;
3. Perolehan akreditasi internasional belum merata di semua fakultas.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan 3 prodi tersebut dan mempelajari proses pengajuan reakreditasi;
2. Memastikan bahwa lembaga akreditasi yang dituju masih diakui oleh pemerintah;
3. Mendorong dan memberikan sosialisasi pada fakultas yang belum memiliki prodi terakreditasi internasional.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Berbagai aplikasi seperti SISTER (Sistem Informasi Terintegrasi) dan Dashboard IKU digunakan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas tata kelola non-akademik dalam sistem pengendalian dan pengawasan internal. Semua aplikasi pendukung dapat diakses oleh semua pihak sesuai tugas dan kewenangannya, memungkinkan pimpinan melakukan monitoring langsung.

Kendala/Permasalahan

- Pengembangan dashboard pada level indikator kinerja kegiatan.
- Pemahaman implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan UNEJ tidak merata.

Strategi/Tindak Lanjut

- Penguatan pengukuran kinerja di lingkungan UNEJ;
- Penguatan evaluasi AKIP dan LAKIN unit kerja;
- Pengukuran kinerja tiap triwulan melalui Dashboard IKU;
- Pengembangan dashboard dengan integrasi data dari berbagai sumber perlu terus dikawal hingga dapat dimanfaatkan unit kerja dengan baik.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi:

1. Peningkatan Kinerja Anggaran: UNEJ telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam NKA pada tahun 2024, mencapai 118%, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran;
2. Koordinasi Rutin Penganggaran: Dilakukan koordinasi secara rutin antara bagian Perencanaan Program dan Anggaran (PPA), Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (EPPA), Tim Pengadaan, dan Bagian Keuangan dalam pencapaian target NKA;
3. Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Rapat bersama pimpinan Wakil Rektor II diadakan dalam upaya pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bersama seluruh elemen tim pengadaan;
4. Pendampingan Unit Kerja: Dilakukan pendampingan kepada unit kerja dalam penyusunan revisi dan serapan anggaran;
5. Monitoring Anggaran Terintegrasi: Pelaksanaan anggaran belanja modal dan kegiatan dimonitoring melalui integrasi data pada aplikasi Simkeu, Sibaja, Omspan, dan Molk;
6. Penyesuaian DIPA: Halaman 3 DIPA disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan setiap triwulan;
7. Inovasi Penyusunan RBA: Dilakukan inovasi dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dengan memasukkan manajemen risiko pada aspek anggaran, sehingga perencanaan penggunaan anggaran dengan realisasinya semakin baik;
8. Pengelolaan Tata Kelola dan Transparansi: UNEJ berhasil mempertahankan dan meningkatkan predikat SAKIP, menunjukkan pengelolaan tata kelola dan transparansi yang baik, yang berkontribusi pada NKA.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa kendala dan dampaknya dalam pencapaian IKU 10 adalah:

1. Pelaksanaan Kegiatan Menumpuk di Akhir Tahun: Pelaksanaan program kegiatan tidak merata sepanjang tahun, dengan banyak kegiatan menumpuk pada akhir tahun.
Dampak: Menghambat efisiensi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang optimal sepanjang tahun;
2. Kesadaran Update Data Rendah: Minimnya kesadaran operator untuk memperbarui data terkait paket pengadaan, baik yang masih dalam proses pelaksanaan maupun paket yang telah selesai.
Dampak: Menyebabkan ketidakakuratan data pengadaan dan menyulitkan pemantauan real-time kinerja anggaran;
3. Penyusunan Anggaran yang Bersifat Umum: Penyusunan anggaran yang bersifat umum, menyebabkan over fleksibilitas dalam penyerapan anggaran yang berakibat adanya pagu minus untuk beberapa program/kegiatan.
Dampak: Memerlukan revisi anggaran berulang kali, yang menghabiskan waktu dan sumber daya;
4. Implementasi Aturan Baru (RO berbasis SBK): Nilai NKA menurun disebabkan oleh implementasi aturan baru terkait rincian output (RO) berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) dan eselon I Dikti belum menerapkan SBK.
Dampak: Menunjukkan tantangan adaptasi terhadap regulasi baru yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran jangka pendek.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Anggaran:
Perbaikan Perencanaan: Melakukan perbaikan perencanaan dengan mereview DIPA secara periodik, mengendalikan dan mengoptimalkan revisi anggaran, serta mempersiapkan alokasi anggaran untuk pekerjaan lanjutan atau tunggakan.
Pembuatan Simulasi NKA: Membuat simulasi perhitungan capaian Efektivitas Kinerja Anggaran (EKA), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan NKA untuk memperkirakan pencapaian NKA pada tahun berjalan.
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Eksekusi: Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
Optimalisasi Update Data: Penambahan fitur baru pada aplikasi Sibaja berupa pemberian advice untuk operator pengadaan agar operator dan staf PPK segera melakukan update data.
2. Percepatan Pelaksanaan Program dan Pengadaan Barang/Jasa:
Proporsionalitas Penyerapan Anggaran: Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
Percepatan Pelaksanaan PBJ: Menetapkan Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan segera setelah DIPA disahkan, mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan proses PBJ, dan mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran.
Penyelesaian Kegiatan TW I: Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya di bawah Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan I.
Pelaksanaan Pembayaran Tepat Waktu: Melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai secara tepat waktu.
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja:
Pembatasan Belanja Operasional: Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas, dan konsinyering serta honor tim.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Fokus pada Output dan Outcome: Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
4. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Internal:
Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran: Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala.
Peningkatan Peran APIP: Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.
5. Akselerasi Pelaksanaan Kegiatan Layanan BMN



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri [IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan

- Pembangunan Zona Integritas (ZI): ZI merupakan instrumen penting dalam Reformasi Birokrasi yang mengarahkan institusi publik untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. ZI dirancang untuk mencegah segala bentuk korupsi melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Sosialisasi dan Edukasi Intensif: Dilakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif mengenai pentingnya zona integritas pada semua unit kerja;
- Komitmen Pimpinan Unit Kerja: Komitmen dari pimpinan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas diwujudkan melalui pakta integritas.
Alokasi Sumber Daya: Dilakukan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pembangunan zona integritas;
- Penguatan Pengawasan Internal: Penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Whistle Blowing System (WBS) sebagai mekanisme penyampaian pengaduan internal terkait dugaan penyalahgunaan di unit kerja;
- Optimalisasi Website SPI: Dilakukan optimalisasi website Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk transparansi dan akuntabilitas kegiatan SPI, termasuk penyediaan menu layanan konsultasi.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala dan dampaknya dalam pencapaian IKU 11 adalah:

1. Prioritas Fakultas yang Berbeda: Beberapa Fakultas masih lebih memusatkan perhatian pada usaha meningkatkan penyelenggaraan Tridharma daripada pembangunan ZI.
Dampak: Memperlambat adopsi dan implementasi ZI di seluruh fakultas secara merata, karena fokus sumber daya dan perhatian dialihkan ke kegiatan akademik inti.
2. Pemahaman Pembangunan ZI yang Belum Merata: Pemahaman mengenai pembangunan ZI WBK/WBBM di tingkat internal fakultas masih belum merata.
Dampak: Menghambat pelaksanaan ZI yang konsisten dan efektif di tingkat operasional, karena kurangnya kesamaan persepsi dan pengetahuan.
3. Perubahan Budaya Kerja yang Kompleks: Perubahan budaya kerja adalah proses kompleks yang memerlukan waktu cukup lama untuk diterima dan diadopsi oleh seluruh fakultas.
Dampak: Implementasi ZI membutuhkan perubahan mendalam pada kebiasaan kerja dan mentalitas, yang sulit dicapai dalam waktu singkat, sehingga memperlambat progres pembangunan ZI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan Komitmen dan Pemahaman Zona Integritas:
Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan: Melakukan sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM secara terus-menerus yang melibatkan Tim Kerja ZI Fakultas Hukum sebagai unit kerja perintis sejak tahun 2021.
Penguatan Pemahaman: Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan workshop, serta sosialisasi melalui media sosial dan apel pagi untuk penguatan pemahaman mengenai pembangunan ZI di lingkungan UNEJ.
Penciptaan Role Model: Mendorong penciptaan role model untuk menginspirasi fakultas lain dalam membangun ZI.
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas:



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI di Fakultas dan Pascasarjana secara berkala, termasuk progres pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) di Fakultas.

Transformasi Menuju PTN-BH: Mempercepat transformasi dari PTN-BLU menjadi PTN-BH yang berkeadilan, karena status PTN-BH diharapkan meningkatkan otonomi dan akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan.

Pengembangan Aplikasi untuk Tata Kelola: Mengembangkan dan memutakhirkan aplikasi untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif, yang juga akan menunjang transparansi ZI.

3. Optimalisasi Sumber Daya dan Keterlibatan:

Alokasi Sumber Daya Memadai: Memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pembangunan zona integritas.

Membangun Budaya Mutu: Mengoptimalkan penerapan budaya mutu akademik dan non-akademik di seluruh unit kerja.

Keterlibatan Pihak Eksternal: Mengoptimalkan website SPI sebagai media layanan konsultasi, termasuk forum interaktif, untuk meningkatkan partisipasi dan laporan dari semua pihak pemangku kepentingan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	Lembaga	0	0	Rp32.929.430.000	Rp27.648.658.048	83.96
2	[DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp3.400.000.000	Rp1.523.642.832	44.81
3	[DK.7729.BEI.004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp31.490.570.000	Rp17.655.836.300	56.07
4	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	0	0	Rp5.479.480.000	Rp1.333.996.440	24.35
5	[DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran PNPB BLU	Paket	13	16	Rp8.889.830.000	Rp1.627.022.747	18.30
6	[DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran PNPB BLU	Paket	19	24	Rp11.500.000.000	Rp5.332.700.923	46.37
7	[DK.7730.CBJ.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran PNPB BLU	unit	0	1	Rp27.120.000.000	Rp3.943.544.764	14.54



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
8	[DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan PNPB BLU	Orang	40000	40000	Rp216.634.050.000	Rp149.613.943.729	69.06
9	[DK.7730.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran PNPB BLU	Orang	948	948	Rp54.581.076.000	Rp36.177.107.805	66.28
10	[DK.7730.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNPB BLU	Orang	1302	1982	Rp51.213.394.000	Rp26.327.851.448	51.41
11	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
12	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp245.875.091.000	Rp203.386.085.273	82.72
Total Anggaran					Rp689.122.921.000	Rp474.570.390.309	68.87

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Pimpinan Fakultas wajib mengaktifkan Dosen Pembimbing Skripsi untuk kontak alumni dan mengawasi upgrade data tracer study yang dimobilisasi di tingkat Prodi.
2. Pimpinan unit kerja meningkatkan sosialisasi pemanfaatan peluang pertukaran pelajar PTN, serta memastikan Prodi mengawasi pengulangan kegiatan MBKM oleh mahasiswa.
3. Pimpinan unit kerja mengawal pendataan seluruh kinerja dengan baik, dan memastikan terlaporkan dalam dashboard iku.unej.ac.id.
4. LP2M dan pimpinan unit kerja mendorong program dan hibah dosen dari eksternal, mengedepankan kegiatan di luar kampus/luar negeri, dengan target peningkatan luaran terukur sampai dengan tingkat Prodi. Pimpinan unit kerja memperluas mitra dan jenis implementasi kerjasama Tridharma, terutama dengan alumni.
5. Pusat Jaminan Mutu dan Prodi harus memastikan validasi RPS digeser ke awal perkuliahan dan menyelenggarakan pelatihan metode pembelajaran secara periodik untuk memperbaiki keselarasan kurikulum.
6. Seluruh Pimpinan Unit Kerja diperintahkan mengendalikan pelaksanaan anggaran dengan tetap mengedepankan efisiensi.
7. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana harus meningkatkan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) secara berkala dan berfokus pada penciptaan role model ZI di masing-masing unit kerja.

Jember, 7 November 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Rektor
 Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM.,
 ASEAN Eng.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
 Sertifikasi
 Elektronik**